

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Rahmatullah, A. (2019, Unismuh) Meneliti tentang peran pemerintah daerah dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, dan memfasilitasi pelatihan bagi petani guna meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan di bidang pertanian.
2. Penyuluh pertanian berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, yang melakukan pendampingan secara langsung di lapangan agar petani dapat menerapkan pengetahuan hasil pelatihan.
3. Program pelatihan dan pendampingan terbukti meningkatkan pengetahuan petani dalam hal pengelolaan lahan, penggunaan teknologi pertanian, serta efisiensi produksi.
3. Terdapat peningkatan kemandirian petani setelah mengikuti kegiatan pembinaan tersebut, baik dalam aspek teknis (cara budidaya), ekonomi (pengelolaan hasil), maupun sosial (kerjasama kelompok tani).
5. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi dukungan kebijakan daerah, ketersediaan penyuluh yang kompeten, dan partisipasi aktif petani.
6. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan kurangnya keberlanjutan program pelatihan.

- a. Keunggulan penelitian
 - 1) Relevansi tematik yang kuat, yaitu menyoroti peran pemerintah daerah dan penyuluh dalam meningkatkan kualitas SDM tema yang sejalan dengan upaya pengembangan SDM di sektor pertanian dan peternakan.
 - 2) Pendekatan penelitian yang komprehensif, karena mengkaji hubungan antara kebijakan pemerintah, pelaksanaan pelatihan, hingga dampaknya terhadap perubahan perilaku dan kemampuan petani. Bersifat aplikatif dan empiris, sebab hasil penelitian didasarkan pada data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan.
 - 3) Memberikan dasar konseptual bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam konteks peningkatan SDM melalui program-program pemerintah seperti Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) yang memiliki kesamaan tujuan dalam peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian dan peternakan.
2. Suryani, D. (2021) meneliti tentang “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kewirausahaan di Kabupaten Maros”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Maros menjalankan perannya dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui kegiatan kewirausahaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat

berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Sosial, pendamping lapangan, serta masyarakat penerima manfaat program kewirausahaan. Fokus utama penelitian adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana bentuk peran Dinas Sosial dalam setiap tahapan program pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Maros memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan kewirausahaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Dinas Sosial menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kecil seperti usaha menjahit, kuliner, dan kerajinan tangan., dinas memberikan penyuluhan dan pendampingan intensif agar masyarakat termotivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dinas Sosial menjembatani kerja sama antara masyarakat dengan lembaga keuangan mikro, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberlanjutan usaha.

a. Keunggulan Penelitian

- 1) Penelitian ini mampu menggambarkan secara komprehensif peran lembaga pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat miskin, dengan menekankan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek

bantuan finansial, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan dan kemandirian individu melalui pelatihan dan pendampingan. Menekankan pada kolaborasi antarinstansi pemerintah

- 2) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program kewirausahaan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap dinamika hubungan antara pemerintah daerah, pendamping lapangan, dan masyarakat penerima manfaat secara mendalam.
- 3) Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program secara rinci, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan program serupa.

Untuk lebih jelasnya, Kesimpulan dari penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmatullah, A. (2019)	Peran Dinas Pertanian dalam	Peran pemerintah daerah dan penyuluh melalui pelatihan &	Sama-sama menekankan peran	Fokus lebih umum pada bidang pertanian;

		meningkatkan kualitas SDM bidang pertanian	pendampingan meningkatkan kualitas SDM di sektor pertanian.	pemerintah daerah dan pelatihan/pendampingan untuk meningkatkan SDM.	Lokasi penelitian yang dilakukan
2.	Suryani, D. (2021)	Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Kewirausahaan di Kabupaten Maros	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan masyarakat miskin	Sama-sama meneliti peran dinas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program pemberdayaan masyarakat.	Fokus dan bidang program yang dikaji, serta Lokasi penelitian.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Dasar Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Dessler (2020) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, termasuk di sektor pertanian dan peternakan, SDM adalah aset penting dalam organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu dalam mencapai tujuan. Dalam konteks peternakan, SDM peternak adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki peran langsung dalam kegiatan produksi, pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran hasil ternak.

Menurut Soetrisno & Ani (2020) SDM peternak dapat didefinisikan sebagai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peternak dalam mengelola usaha ternak agar dapat memberikan hasil optimal baik dari sisi produksi maupun ekonomi, kualitas SDM peternak berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan usaha peternakan karena peternak merupakan pelaku utama dalam adopsi inovasi teknologi dan penerapan manajemen usaha.

2. Konsep Peran

Pada umumnya peran dapat diartikan suatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan utama dalam terjadinya suatu hal, kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma atau peraturan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2014:210-211) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan

sesuai hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola kehidupannya. Hal ini bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan yaitu mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompok. Peranan diatur dalam norma-norma yang berlaku yang lebih merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Dalam sebuah organisasi atau lembaga setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing lembaga atau organisasi. Levinson dalam Soekanto (2014:211) mengatakan peranan mencakup tiga hal:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan di suatu daerah, hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dikuatkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena pemerintah pada dasarnya merupakan satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki sistem wewenang dan kekuasaan untuk mengatur, harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran yang disoroti dalam Siagian Sondang P (2018:142-149) menyatakan bahwa peranan penting pemerintah terlibat dalam lima wujud utama sebagai berikut.

- 1) Selaku *Stabilisator*, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif.
- 2) Selaku *Inovator*, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.
- 3) Selaku *Modernisator*, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan yang modern.
- 4) Selaku *Pelopor*, aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat.
- 5) Selaku *Pelaksana sendiri*, pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan

3. Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Berikut program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kualitas SDM peternak:

a. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2011, program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan sektor peternakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kesmavet berperan strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan serta menjamin keamanan pangan asal hewan.

Di Kabupaten Balangan, pelaksanaan program Kesmavet menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3). Program ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung sistem kesehatan hewan nasional serta peningkatan ketahanan pangan daerah. Sebagai daerah dengan potensi peternakan yang cukup besar seperti sapi potong, ayam ras, dan kambing, Balangan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan hewan dan kualitas produk pangan asal hewan. Melalui program Kesmavet, pemerintah daerah berupaya mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti antraks, rabies, dan flu burung, serta memastikan

bahwa produk hewan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi prinsip ASUH.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH, 2020), Program Kesmavet di Kabupaten Balangan meliputi beberapa kegiatan pokok, antara lain pengawasan rumah potong hewan (RPH), pengendalian zoonosis, peningkatan kapasitas peternak melalui penyuluhan, dan pemeriksaan keamanan pangan asal hewan di pasar dan tempat penjualan. Pemerintah daerah juga melakukan sertifikasi produk asal hewan, memastikan bahwa daging, telur, dan susu yang beredar di masyarakat telah melalui proses pemeriksaan kesehatan. Kegiatan Kesmavet di daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan prinsip One Health, yaitu kolaborasi antara sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Pendekatan ini relevan di Balangan mengingat sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor peternakan sebagai sumber penghidupan, sehingga kesehatan hewan dan manusia saling berpengaruh.

Selain itu, Menurut Rahman (2022) pelaksanaan Kesmavet di Kabupaten Balangan juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan, peternak diberikan pengetahuan mengenai sanitasi kandang, biosekuriti, pengolahan limbah ternak, serta cara penanganan produk hewan yang baik dan benar., peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak merupakan bagian integral dari keberhasilan program Kesmavet,

karena perilaku dan kebiasaan peternak dalam mengelola hewan ternak sangat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan peternak, diharapkan praktik peternakan di Balangan dapat berjalan lebih higienis, efisien, dan berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3 telah menyesuaikan arah program Kesmavet dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Pelaksanaan Kesmavet di tingkat daerah juga sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024, yang menekankan pentingnya jaminan produk hewan ASUH sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, program ini bukan hanya tanggung jawab teknis dokter hewan, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, Kesmavet berkontribusi dalam mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan. Misalnya, kasus rabies atau antraks dapat menurunkan produktivitas peternakan sekaligus mengancam kesehatan masyarakat. Melalui

kegiatan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, serta penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah daerah berupaya meminimalkan risiko tersebut. Selain itu, pengawasan ketat terhadap RPH dan tempat penjualan daging di Kabupaten Balangan memastikan bahwa daging yang dikonsumsi telah melalui pemeriksaan ante mortem dan post mortem oleh petugas berwenang.

Dengan demikian, secara teoritis program Kesmavet di Kabupaten Balangan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengendalian penyakit hewan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program ini menuntut kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, petugas kesehatan hewan, dokter hewan, penyuluh, dan masyarakat peternak. Pendekatan *One Health* yang diterapkan dalam program ini menegaskan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait, sehingga keberhasilan Kesmavet akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Balangan secara menyeluruh.

b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Peternakan

Menurut Mardikanto (2013). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan peternakan. KIE bertujuan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh peternak agar mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Menurut Zakaria et al. (2021), kegiatan KIE terbukti meningkatkan kesadaran peternak dalam penerapan teknologi dan praktik manajemen peternakan modern. Hal ini menjadi wadah penting untuk memperluas wawasan peternak tentang manajemen kesehatan ternak, reproduksi, serta pemasaran produk peternakan.

c. Keamanan Pangan Asal Hewan dan Konsep ASUH

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Keamanan pangan asal hewan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan asal hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia., keamanan pangan merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi agar pangan aman dikonsumsi masyarakat.

Dalam konteks peternakan, keamanan pangan asal hewan mencakup semua produk yang berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, dan produk olahannya. Produk tersebut harus memenuhi standar higienis dan bebas dari cemaran yang berbahaya bagi konsumen.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (2020) memperkenalkan standar pangan asal hewan yang dikenal dengan istilah ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

- 1) Aman: Produk asal hewan bebas dari penyakit zoonosis, residu obat, logam berat, pestisida, maupun cemaran biologis lain.
- 2) Sehat: Mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh serta berasal dari ternak yang sehat.
- 3) Utuh: Tidak dicampur dengan bahan lain yang dapat mengurangi mutu maupun mengubah keaslian produk.
- 4) Halal: Diproses sesuai syariat Islam, mulai dari penyembelihan, pengolahan, hingga distribusi.

Konsep ASUH menjadi indikator utama dalam menjamin kualitas pangan asal hewan yang beredar di masyarakat.

d. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Menurut Hidayat (2019) Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) merupakan instrumen perlindungan peternak dari risiko kerugian akibat kematian atau kehilangan ternak., asuransi ternak memberikan rasa aman dan membantu menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Program ini diluncurkan oleh pemerintah untuk mengurangi kerugian ekonomi peternak akibat wabah penyakit atau kecelakaan.

e. Inseminasi Buatan (IB)

Menurut Toelihere (1993), Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu teknologi reproduksi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas ternak, IB memungkinkan peningkatan mutu genetik ternak secara cepat dengan biaya relatif rendah.

Penelitian Rasyid (2017) juga menunjukkan bahwa penerapan IB berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka kelahiran sapi potong di Indonesia.

Namun, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga inseminator dan rendahnya pemahaman peternak dalam manajemen reproduksi.

f. Gerakan Gemar Makan Daging, Susu, dan Telur

Menurut (Suhardjo, 2010) Merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada anak-anak. Konsumsi protein hewani sangat penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak. Menurut Kementerian Pertanian. (2021), kampanye peningkatan konsumsi protein hewani merupakan salah satu strategi menurunkan angka stunting di Indonesia.

4. Landasan Hukum Kesmavet di Indonesia

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat karena menyangkut kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta perdagangan produk hewan.

Landasan hukum ini mengatur aspek kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan, dan jaminan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

a. Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014.

a) Menegaskan bahwa kesehatan masyarakat veteriner merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

b) Mengatur pengawasan, pemeriksaan, sertifikasi, serta distribusi produk hewan untuk menjamin keamanan pangan.

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

a) Menyatakan bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

b) Pangan asal hewan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

a) Mengatur kewajiban sertifikasi halal, termasuk untuk produk pangan asal hewan.

b) Berkaitan erat dengan konsep ASUH, terutama aspek “Halal”.

b. Peraturan Pemerintah

1) PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

a) Menjadi regulasi utama Kesmavet di Indonesia.

b) Mengatur aspek pengendalian zoonosis, jaminan keamanan pangan asal hewan, hingga tata kelola Rumah Potong Hewan (RPH).

2) PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

a) Mengatur standar mutu pangan, termasuk produk asal hewan.

b) Menjadi acuan pengawasan keamanan pangan hewani dari hulu hingga hilir.

c. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

1) Permentan Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

a) Mengatur sertifikasi bagi unit usaha pangan asal hewan (peternakan, RPH, industri olahan).

b) NKV menjadi bukti tertulis pemenuhan persyaratan higienis-sanitasi sesuai standar Kesmavet.

2) Permentan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

a) Mengatur standar teknis dan operasional RPH agar produk daging memenuhi syarat ASUH.

3) Permentan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Veteriner.

a) Mengatur kewajiban sertifikat veteriner pada peredaran produk hewan dan hasil olahannya.

5. Peran DKP3 dalam Pembangunan SDM Peternak melalui Kesmavet

Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2019), sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan, serta keterampilan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Konteks pembangunan sektor peternakan, peningkatan kualitas SDM peternak menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan usaha peternakan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Handoko, T. Hani. 2014 pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan kemampuan individu melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Maka dari itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternak merupakan faktor kunci dalam pembangunan subsektor peternakan.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2020), prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) merupakan standar mutu produk hewan yang harus dipenuhi agar pangan asal hewan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Penerapan prinsip ini dilakukan melalui pengawasan kesehatan hewan, sanitasi lingkungan peternakan, serta pengendalian penyakit hewan. Dalam konteks Kabupaten Balangan,

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) memiliki mandat untuk meningkatkan kapasitas peternak, tidak hanya dari sisi teknis beternak, tetapi juga dalam hal pemahaman kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penerapan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal).

Menurut World Health Organization. 2002 kesehatan masyarakat veteriner merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia melalui pengendalian penyakit yang berasal dari hewan, pengawasan keamanan pangan asal hewan, serta peningkatan kesehatan hewan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan produk hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat serta mencegah penyebaran penyakit zoonosis. Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menjadi salah satu instrumen strategis yang dijalankan DKP3 untuk membangun peternakan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memenuhi standar kesehatan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, menegaskan bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak serta penerapan sistem kesehatan hewan

- nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit hewan menular. Hal ini menjadi bagian penting dalam implementasi Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di daerah.
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner, memberikan arahan teknis bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan kegiatan Kesmavet. Tujuannya untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk asal hewan yang dikonsumsi masyarakat, serta melindungi masyarakat dari penyakit zoonosis.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan, mengarahkan pembangunan sektor pertanian dan peternakan untuk mewujudkan Balangan yang sejahtera dan berdaya saing melalui penguatan SDM serta ketahanan pangan dan kesehatan hewan. Salah satu indikator yang ditekankan dalam RPJMD adalah peningkatan kapasitas peternak melalui program pembinaan dan kesehatan hewan berbasis masyarakat.

2. Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan merupakan perangkat daerah yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dinas ini memiliki tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program peningkatan SDM peternak, termasuk pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di tingkat desa. Berdasarkan landasan hukum dan kondisi empiris di lapangan, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dalam meningkatkan kualitas SDM peternak di Desa Sumber Rejeki sangat bergantung pada optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Dinas harus berperan aktif sebagaimana Peran Pemerintah (Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, Pelaksana Sendiri) Sondang P Siagian (2018:142:149), yaitu :

- a. Stabilisator, dinas seharusnya berperan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan peternakan melalui kebijakan dan pembinaan yang berkesinambungan. Namun pada kenyataannya, pembinaan terhadap peternak masih bersifat tidak merata, sehingga stabilitas dalam penerapan prinsip kesehatan ternak belum tercapai. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara peternak yang aktif mengikuti pembinaan dan yang belum tersentuh program.

- b. Inovator, dinas diharapkan mampu menciptakan terobosan baru dalam manajemen kesehatan hewan dan pengembangan SDM peternak. Akan tetapi, inovasi dalam bentuk metode pelatihan modern, penerapan teknologi digital peternakan, maupun sistem informasi kesehatan hewan masih terbatas. Akibatnya, peternak masih mengandalkan cara tradisional dalam pengelolaan usaha ternak, sehingga produktivitas tidak mengalami peningkatan signifikan.
- c. Modernisator, dinas seharusnya menjadi penggerak modernisasi sistem peternakan yang berbasis kesehatan, efisiensi, dan teknologi. Namun dalam kenyataannya, sarana pendukung seperti alat uji kesehatan hewan, laboratorium, serta tenaga medis veteriner masih minim. Akibatnya, proses modernisasi peternakan berjalan lambat dan tidak merata di tingkat desa.
- d. Pelopor, dinas semestinya menjadi contoh dan penggerak utama dalam penerapan prinsip kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerjanya. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi, demonstrasi lapangan, dan program edukatif bagi peternak. Akibatnya, minat dan partisipasi masyarakat dalam program Kesmavet masih rendah.
- e. Pelaksana sendiri, pemerintah daerah melalui dinas terkait seharusnya mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan veteriner secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pusat. Namun kenyataannya, pelaksanaan program Kesmavet di daerah masih sangat bergantung pada anggaran dan arahan dari pemerintah

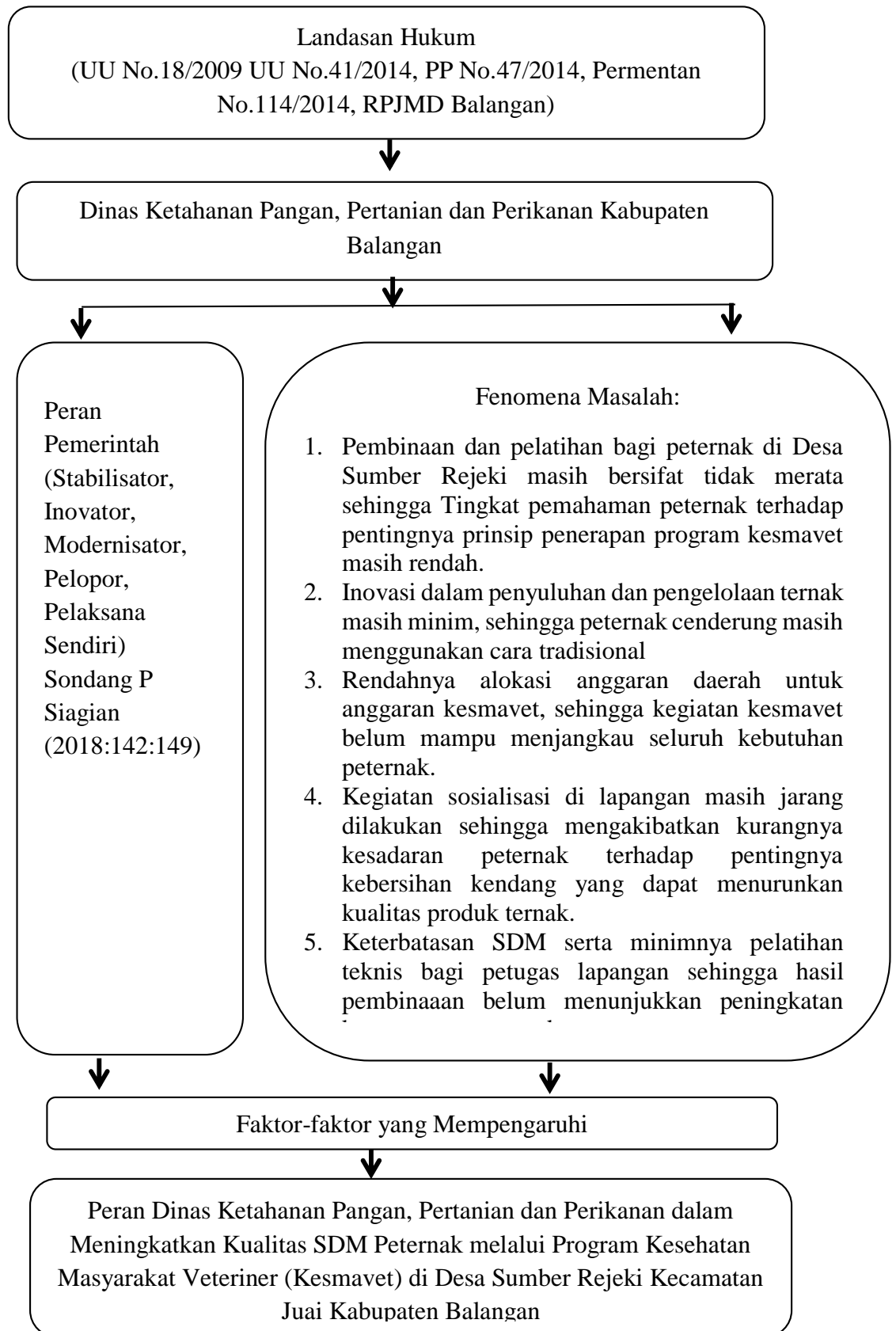
provinsi maupun pusat. Akibatnya, fleksibilitas dan kemandirian daerah dalam mengembangkan program kesehatan hewan menjadi terbatas.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas peran DKP3 dalam meningkatkan SDM peternak melalui Program Kesmavet antara lain: faktor sumber Daya Manusia, meliputi jumlah dan kompetensi penyuluh tenatenaga medis veteriner, serta tingkat pengetahuan peternak yang masih beragam.

- a. Faktor Sarana dan Prasarana, seperti ketersediaan laboratorium kesehatan hewan, peralatan uji, fasilitas vaksinasi, serta akses terhadap teknologi modern yang masih terbatas.
- b. Faktor Pendanaan dan Kebijakan, yaitu keterbatasan anggaran daerah dan ketergantungan pada program dari pemerintah pusat, yang menyebabkan pembinaan tidak berjalan secara berkelanjutan.
- c. Faktor Koordinasi dan Partisipasi, yakni masih lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya partisipasi aktif peternak dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
- d. Faktor Sosial-Ekonomi, termasuk tingkat pendidikan, kesadaran kesehatan, dan kemampuan ekonomi peternak yang memengaruhi penerapan prinsip Kesmavet di lapangan.

4. Gambar Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran